

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini laju pertumbuhan ekonomi global semakin cepat. Hal ini menuntut manusia senantiasa untuk mengikutinya. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi indikator kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Oleh sebab itu, Lastri, dkk (2020:152) memberikan pendapatnya bahwa laju pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya.

Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat yang tidak terbatas terlebih lagi pada usia produktifnya (Hidayati, 2017:288). Kini masyarakat semakin sadar bahwa mereka perlu menyetor dan menyimpan sebagian pendapatan mereka guna memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah tidak lagi dalam usia produktif.

Terdapat beberapa alternatif dapat dilakukan, salah satunya adalah kegiatan investasi. Investasi merupakan penanaman atau penyimpanan uang/dana dalam bentuk aset dengan kurun waktu tertentu guna memperoleh laba/untung demi memenuhi kebutuhan perseorangan dan/atau kelompok (Hidayati, 2017:228). Selain itu, Kurniawan(2016:2) berpendapat investasi ialah penyimpanan modal dalam kurun periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Investasi ini sangat membantu kegiatan ekonomi bagi pelaku usaha maupun individu. Investasi merupakan indikator kemajuan

perekonomian sebuah negara. Kurniawan(2016:1) juga mengatakan bahwa ketika tingkat investasi di sebuah negara tinggi, maka tinggi pula laju pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, jika angka investasi rendah, maka rendah pula laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Sejalan dengan kegiatan investasi tersebut, terdapat lembaga keuangan yang berperan penting yaitu lembaga keuangan bank dengan membangun perekonomian rakyat Indonesia sebagai tujuannya. Sakdiyah (2018:31) mengemukakan, perbankan berfungsi sebagai *financial intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sistem perkreditan ini menjadi strategi yang baik untuk memulihkan ekonomi nasional dan tentunya menjadi daya tarik bagi calon nasabah yang akan memilih perbankan untuk menjadi mitra kerja sama dalam meningkatkan kondisi finansial mereka. Lembaga keuangan dengan proses mudah dan suku bunga ringan merupakan idaman bagi calon nasabah yang akan memilihnya (Rahmawati, 2019:63).

Kasmir (2014 : 35) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis perbankan menurut fungsinya. Pertama, Bank Sentral yaitu lembaga perbankan yang mengatur dan menjaga kestabilan kurs mata uang negara. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kedua, Bank Umum ialah lembaga perbankan yang sering digunakan untuk transaksi keuangan. Bank Umum ini menyediakan berbagai jasa untuk mempermudah kegiatan keuangan nasabahnya. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, Fibriyanti, dkk (2019 : 791) memaparkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga perbankan juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan layanan jasa pinjaman yang sederhana, tidak memakan waktu lama, dan melalui pendekatan individu.

Sakdiyah (2018 : 29) mengungkapkan bahwa dengan prinsip BPR yang mengedepankan pelayanan yang mudah dan singkat tetapi tetap memegang teguh azas kehati-hatian dalam menjalankan aktivitasnya, maka BPR menjadi pilihan para nasabah untuk saling bekerja sama. Selaras dengan Rahmawati, dkk (2019 : 63) yang menyatakan bahwa dengan sistem promosi yang baik, BPR dapat mengenalkan produk-produk mereka, terutama produk perkreditan yang tentunya memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat. Oleh karena itu, BPR dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sakdiyah (2019 : 29) memberikan beberapa sektor yang menjadi sasaran pasar BPR, antara lain petani, peternak, nelayan, pedagang dan pengusaha kecil, pegawai, serta masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka tidak mengajukan pinjaman kredit kepada rentenir.

Kini, produk perkreditan BPR menjadi primadona di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rahmawati, dkk (2019 : 63), memutuskan pilihan untuk melakukan perkreditan di BPR adalah sebuah

pertimbangan yang cukup matang. Sebab, BPR memberikan fasilitas ini secara mudah dengan waktu proses penyaluran kredit yang singkat.

Yulisari, dkk (2014:34) mengungkapkan bahwa dalam penyaluran kredit tersebut, BPR memiliki prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah dalam pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian, untuk menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang dalam melakukan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank. Yulisari, dkk (2014 : 32) juga memberi penjelasan bahwa dalam pemberian kredit, BPR harus melakukan sikap hati-hati terhadap penilaian nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa BPR menjamin lancarnya proses perkreditan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah kredit macet.

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Hohedu, dkk, 2019:36). Kredit macet juga dapat diartikan sebagai kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Kredit macet merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit (Nursyahriana, dkk, 2017:3). Menurut Putri, dkk (2020:188) kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulisari, dkk (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran kredit masih dikategorikan

kurang baik sebab masih kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran kredit.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fibriyanti, dkk (2018) menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan presentase sebesar 89,86%. Prosedur yang diberikan merupakan prosedur yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank PD. BPR Daerah Lamongan. Bank ini menggunakan sistem pengendalian internal sebesar 74,6% sehingga dapat dikatakan efektif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perbankan terutama BPR memiliki suatu sistem untuk memberikan informasi terkait calon nasabahnya. Sistem tersebut dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID). Akbar, dkk (2017 : 2) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Debitur yaitu sistem yang memberikan informasi terkait calon debitur atau nasabah sebagai hasil dari pengolahan dari laporan debitur. Sistem ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada perbankan ketika melakukan analisis riwayat calon debitur. Selain itu, SID memberi kemudahan dan mempercepat bagi calon debitur dalam proses perkreditan.

Sumarna, (2019 : 129) mengemukakan bahwa kini SID telah digantikan oleh sistem yang dinilai lebih mutakhir dengan nama SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan dan pelayanan informasi terkait dengan keuangan. Menurut Ningsih, dkk. (2019 : 24) SLIK ialah

sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit guna menghindari resiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran serta untuk menghindari resiko pemberian kredit rangkap.

Secara umum, setiap perbankan menerapkan SLIK untuk merealisasikan aktivitas perkreditannya, tidak terkecuali BPR. Setelah diterapkannya sistem ini terdapat peningkatan jumlah kredit yang diberikan kepada BPR di kabupaten Ponorogo. Dilansir dari laman OJK (www.ojk.go.id), total penyaluran kredit di tiga lembaga BPR di kabupaten Ponorogo pada periode bulan Maret 2020 dan Maret 2021 antara lain: Koperasi BPR Jetis pada Maret 2020 sebesar Rp 12.166.033 pada Maret 2021 naik menjadi Rp 12.578.377, BPR Babadan pada Maret 2020 Rp 13.381.476 naik menjadi Rp 14.075.748 di bulan Maret 2021, dan BPR Aswaja cabang Ponorogo pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 23.707.093 pada Maret 2021 naik menjadi Rp 23.971.302.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa BPR Aswaja cabang Ponorogo memiliki total penyaluran kredit tertinggi daripada Koperasi BPR Jetis dan BPR Babadan. Hal ini menunjukkan bahwa BPR Aswaja dipercaya para mitranya untuk melakukan kegiatan perkreditan. Sehingga, terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan di BPR Aswaja cabang Ponorogo meskipun tidak signifikan. Perihal tersebut tidak lepas dari peran SLIK yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas perkreditan dan kehati-hatian dalam memberikan jaminan keamanan kepada pihak BPR dan nasabahnya untuk

melakukan transaksi perkreditan dan berperan dalam menurunkan resiko kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Prosedur Penyaluran Kredit dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Dan Peran SLIK Terhadap Penurunan Kredit Macet Pada PT. BPR Aswaja (Studi Kasus Pada PT. BPR Aswaja)**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana prosedur penyaluran kredit dengan SLIK pada PT.BPR Aswaja Ponorogo?
- 1.2.2. Bagaimana peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo?

1.3. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dengan baik, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu proses penyaluran kredit dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT BPR Aswaja cabang Ponorogo.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit dengan SLIK pada PT. BPR Aswaja Ponorogo.

2. Untuk mengetahui peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Objek yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dalam meningkatkan mutu pelayanan prosedur penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet bagi PT. BPR Aswaja Ponorogo.

b. Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi khasanah ilmu mengenai prosedur penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis mengenai prosedur penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Objek yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan

untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam prosedur penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo.

b. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penulisan karya tulis dan penelitian selanjutnya bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet pada PT. BPR Aswaja Ponorogo.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Dengan ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya mengenai penyaluran kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan peran SLIK terhadap penurunan kredit macet PT. BPR Aswaja Ponorogo.

